



Sosialisasi Pengajuan Keberatan Melalui Sistem Coretax



Pengajuan Keberatan

2

- SKPKB
- SKPN
- SKPLB
- SKPKBT
- POT/PUT
PIHAK III
- SPPT
- SKP PBB

Dalam jangka waktu
3 bulan

Surat Keberatan

- 1) Tidak diajukan Pasal 36 UU KUP dan/atau Pasal 19 dan Pasal 20 UU PBB
- 2) Tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- 3) **Mengemukakan jumlah pajak yang terutang/dipotong atau dipungut/rugi menurut WP beserta alasan (dasar penghitungan).**
- 4) 1 Keberatan untuk 1 SKP/Pot/Put/SPPT/SKP PBB.
- 5) Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- 6) Di ttd oleh WP/Wakil/Kuasa

Dirjen
Pajak



Memenuhi
persyaratan

Penelitian
keberatan

Tidak memenuhi
persyaratan

Tidak
dipertimbangkan

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan atas keberatan yang tidak memenuhi persyaratan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima pengajuan.

Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat keterangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima permohonan.

Dalam melakukan penelitian keberatan, Direktur Jenderal Pajak dapat:

- 1) Meminjam atau meminta buku, catatan, data, dan/atau informasi kepada Wajib Pajak;
- 2) Meminta keterangan kepada Wajib Pajak;
- 3) Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang diajukan keberatan kepada pihak ketiga;
- 4) Melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak;
- 5) Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 6) Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 7) melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi objek pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, penghimpunan data, keterangan, atau bukti, serta kegiatan lain yang diperlukan; dan/atau
- 8) Melaksanakan pertukaran untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan, perjanjian, atau kesepakatan di bidang perpajakan.

Keberatan

1

Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak **dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima permohonan.**

2

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas keberatan yang tidak memenuhi persyaratan **dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima pengajuan.**

3

Menambahkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan penelitian yaitu:

- Melakukan **penilaian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Melaksanakan **pertukaran untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra** sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan, perjanjian, atau kesepakatan di bidang perpajakan.

4

4

Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan/atau informasi yang dipinjam atau diminta, Wajib Pajak menyatakan hal tersebut dalam **surat pernyataan.**

5

Dalam hal Wajib Pajak telah menguasai pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa:

- hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan; atau
- memberikan surat tanggapan hasil penelitian, tetapi atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban dimaksud dilaksanakan oleh Kuasa dan Wajib Pajak, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang diakui merupakan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

6

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan mengajukan Prosedur Persetujuan Bersama secara bersamaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan:

- a. **pencabutan keberatan**, dalam hal materi yang disengketakan dalam Prosedur Persetujuan Bersama sama dengan materi yang diajukan keberatan; atau
- b. **penyesuaian keberatan**, dalam hal terdapat materi sengketa lain di luar materi yang disengketakan dalam Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan keberatan, sebelum tanggal SPUH diterima oleh Wajib Pajak.

8

Apabila jangka waktu penyelesaian keberatan 12 bulan terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak:

- a. tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan; atau
- b. tidak menyampaikan surat pemberitahuan atas keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, keberatan dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak **dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 bulan berakhir.**

7

Direktur Jenderal Pajak memberikan jawaban berupa surat persetujuan atau surat penolakan atas permohonan:

- a. pencabutan keberatan dalam **jangka waktu paling lama 10 hari kerja**; atau
- b. penyesuaian keberatan **dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan**, sejak tanggal permohonan diterima.

9

Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak harus menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan **paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permintaan tertulis diterima.**

Keputusan Keberatan

Apabila jangka waktu penyelesaian keberatan 12 bulan terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak:

tidak menerbitkan SK Keberatan; atau

tidak menyampaikan surat pemberitahuan atas keberatan yang tidak memenuhi persyaratan,

keberatan dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak **dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 bulan berakhir.**

Pengajuan Banding

Dalam hal diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak harus menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan **paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permintaan tertulis diterima.**

1

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan menyampaikan dokumen dan surat keputusan kepada Wajib Pajak dalam rangka penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan.

2

Penyampaian dokumen dan surat keputusan dapat dilakukan:

- a. **secara elektronik melalui Akun Wajib Pajak;**
- b. secara langsung; atau
- c. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital

Silakan Pilih

ID Penandatanganan*

Verifikasi Identitas

Ceklist pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Tekan tombol "**Kirim**" untuk mengirimkan permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital.

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

7

☐

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

8

Kirim



Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208



Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.



1 500 200



www.pajak.go.id

Tata Cara Pengajuan Keberatan Melalui Sistem Coretax

Langkah 1 : Login



10

Login

ID Pengguna

1

Kata Sandi

2

Pemilihan Bahasa

3

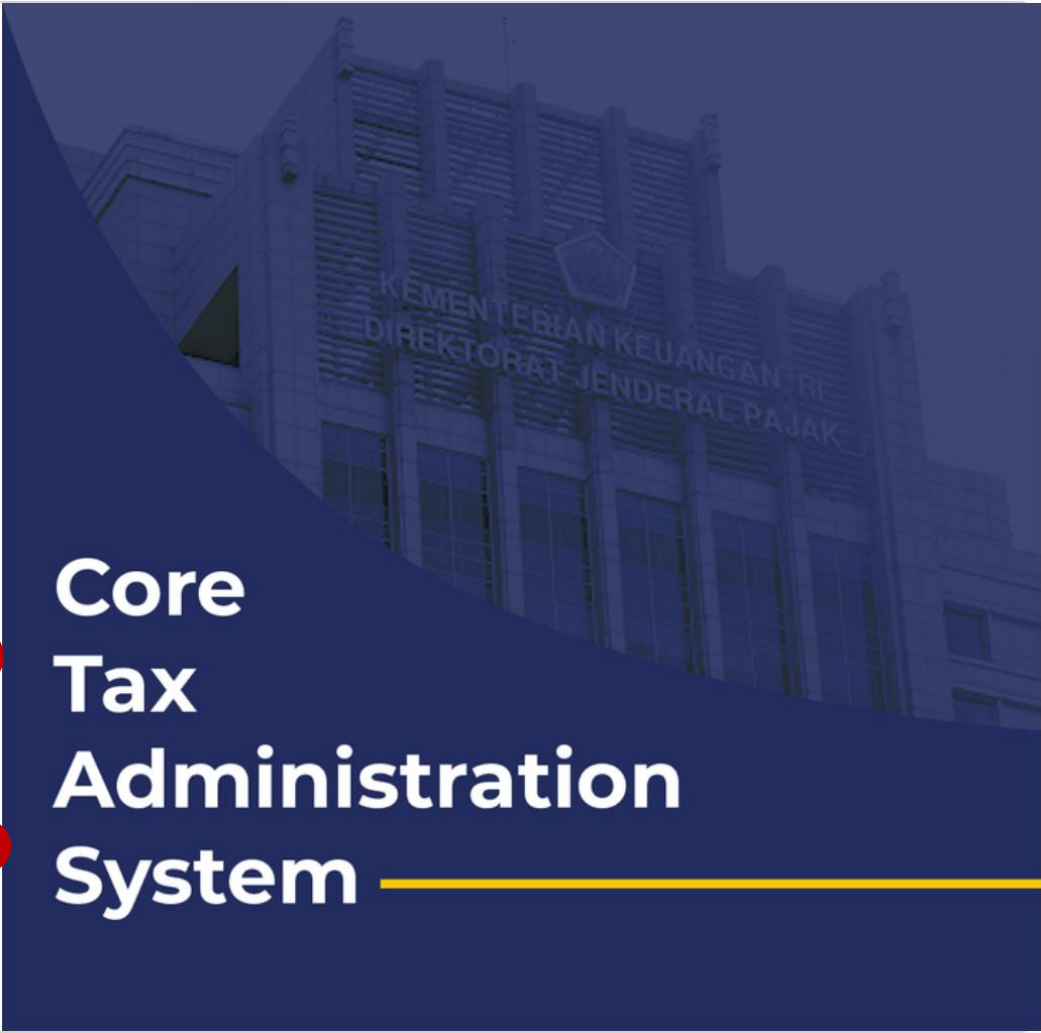
4

Lupa Kata Sandi?

5

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)



Core Tax Administration System

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

Langkah 2: Landing Page Tax Payer Portal

11



Versi: 1.1.2-build-1935 id-ID    Login terakhir: 2 

Portal Saya · e-Faktur · eBupot · Surat Pemberitahuan (SPT) · Bantuan · Pembayaran · Buku Besar · Layanan Wajib Pajak · Manajemen Akses ·

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Ikhtisar Profil Wajib Pajak  Unduh Ikhtisar Profil

Profil

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

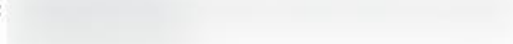
Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Nama : 

NIK/NPWP : 

Kegiatan Utama : 

Jenis Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Kategori Wajib Pajak : Orang Pribadi

Status NPWP : **Aktif**

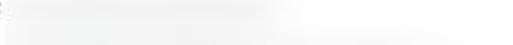
Tanggal Terdaftar : 03 Juli 1985

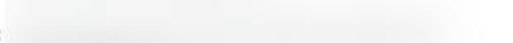
Tanggal Aktivasi : 03 Juli 1985

Taxable Person for VAT Purposes Status : 

Taxable Person for VAT Purposes : -

Appointment Date : 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : 

Kantor Pelayanan Pajak : 

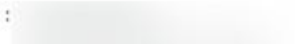
Bagian Pengawasan : 

Tanggal Pembaruan Profil Terakhir : 

Alamat Utama



Kontak Utama

Nomor Handphone : 

Email : 

Main Economic Classification

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 47650

Economic Classification Description : PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON

Langkah 4: Pilih NPWP yg diwakilkan (Badan)

13

Portal Saya • e-Faktur • e-Bupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses •

Versi: 1.1.2-build-1935 id-ID Login terakhir:

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Profil | Daftar Kode Billing Belum Dibayar | Saldo Saat Ini | SPT Belum Disampaikan | Jenis Pajak Terdaftar | Kasus Aktif

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Pemohonan Tertunda

Semua Pemohonan

Nama :

NIK/NPWP :

Kegiatan Utama :

Jenis Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Kategori Wajib Pajak : Orang Pribadi

Status NPWP : **Aktif**

Tanggal Tendaftar : 03 Juli 1985

Tanggal Aktivasi : 03 Juli 1985

Taxable Person for VAT Purposes Status :

Taxable Person for VAT Purposes Appointment Date :

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak : Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Kantor Pelayanan Pajak : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih

Bagian Pengawasan : Seksi Pengawasan II

Tanggal Pembaruan Profil Terakhir : 27 November 2024

Alamat Utama :

Kontak Utama

Nomor Handphone :

Email :

Main Economic Classification

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 47650

Economic Classification Description : PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON

Wajib Pajak : **Pilih Wajib Pajak yg diwakili**

00

Kemampuan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gattot Salawatti, Km. 40-42, Jakarta 12190

Telp: (+62) 21 - 525 0200

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.

1 500 200

Situs Pajak

www.pajak.go.id

Langkah 5: Landing Page Impersonate (Badan)

14

You are currently impersonating user: - I NAMA001000

 Versi: 1.1.2-build-1935 id-ID 00 Login terakhir: 

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Pemohonan Tertunda

Semua Pemohonan

Ikhtisar Profil Wajib Pajak  Unduh Ikhtisar Profil

Profil

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Nama

NIK/NPWP

Kegiatan Utama

Jenis Wajib Pajak

Bentuk Badan Hukum

Status NPWP

Tanggal Terdaftar

Tanggal Aktivasi

Taxable Person for VAT Purposes Status

Taxable Person for VAT Purposes Appointment Date

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Pelayanan Pajak

Bagian Pengawasan

Tanggal Pembaruan Profil Terakhir

Badan

Perseroan Terbatas (PT)

Aktif

31 Desember 1983

-

-

-

-

-

-

-

-

Alamat Utama

Kontak Utama

Main Economic Classification

Nomor Handphone

Email

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha

Economic Classification Description

50111

ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG

 **Kementerian Keuangan**
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gajah Mada No. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0206



Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.

 **1 500 200**

 **Situs Pajak**
www.pajak.go.id

Langkah 6: Buat Permohonan Layanan Administrasi (Badan)

15

You are currently impersonating user: - ! NAMA00 000

Versi: 1.1.2-build-1935 id-ID Login terakhir:

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar **Layanan Wajib Pajak** Manajemen Akses

Layanan Wajib Pajak

- Layanan Administrasi
 - Buat Permohonan Layanan Administrasi**
 - Permohonan Belum Disampaikan
 - Permohonan Dalam Proses
 - Permohonan Telah Selesai
 - Daftar Fasilitas Saya
- Layanan Permintaan Informasi Perpajakan
- Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi
- Layanan Edukasi Perpajakan
 - Riwayat Edukasi
 - Pengetahuan Dasar Perpajakan

Unduh Ikhtisar Profil

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo

Nama	:	
NIK/NPWP	:	
Kegiatan Utama	:	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG
Jenis Wajib Pajak	:	Badan
Bentuk Badan Hukum	:	Perseroan Terbatas (PT)
Status NPWP	:	Aktif
Tanggal Terdaftar	:	31 Desember 1983
Tanggal Aktivasi	:	-
Taxable Person for VAT Purposes Status	:	
Taxable Person for VAT Purposes Appointment Date	:	-
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	:	
Kantor Pelayanan Pajak	:	
Bagian Pengawasan	:	
Tanggal Pembaruan Profil Terakhir	:	

Kontak Utama

Nomor Handphone :
Email :

Main Economic Classification

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 50111
Economic Classification Description : ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum
Alamat
Detail Kontak
Pihak Terkait
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Detail Bank
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
Nomor Identifikasi Eksternal
Jenis Pajak
Wakil/Kuasa Saya
Wajib Pajak yang Diwakili
Verifikasi Dua Langkah
Permohonan Tertunda
Semua Permohonan

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.

1 500 200
www.pajak.go.id

Langkah 7: Pilih Nomor Penunjukan (Badan)

16

You are currently impersonating user: I NAMA00 00

Portal Saya • e-Faktur • eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembiayaan • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan *

Pilih No

Nomor Su

PERMOHONAN LAYANAN

Pencarian Janji Temu

1 2 3 4 5

	Nomor Penunjukan ↑↓	Nomor Dokumen ↑↓	NPWP ↑↓	Nama Wajib Pajak ↑↓	NPWP/NIK Wakil/Kuasa ↑↓	Nama Wakil/Kuasa ↑↓	Tangg
Pilih	DA32256264		00				

1 of 1 << < 1 > >> 10

Kemampuan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Geger Sate, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0338

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak

1 500 200

Situs Pajak

Langkah 8: Pilih Layanan dan Sub-Layanan

17

You are currently impersonating user: - ! NAMA00 000

id-ID 00: Login terakhir:

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan *

DA32256264

Nomor Surat Kuasa

Cari

- AS.25 Layanan Terkait Penagihan Aktif
- AS.26 Keberatan dan Non Keberatan**
- AS.27 Prosedur Kesepakatan Bersama (MAP)
- AS.28 Kesepakatan Harga Transfer
- AS.29 Surat Wajib Pajak
- AS.30 Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terkait investasi yang disampaikan melalui OSS
- AS.31 Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan
- AS.32 Penundaan Pembebanan Kerugian atas Pengalihan atau Penarikan Harta yang Mendapatkan Penggantian Asuransi untuk Dibukukan sebagai Beban Masa Kemudian
- AS.33 Pengesahan
- AS.34 SKB PPN atas Impor/Penyerahan BKP Tertentu atau Pemanfaatan/Penyerahan JKP Tertentu
- AS.35 SKB PPN atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis
- AS.36 SKB PPN atau PPN dan PPNBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
- AS.37 SKB PPNBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor
- AS.38 SKB PPNBM atas Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor
- AS.39 e-Pelaporan
- AS.40 Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Pasal 8 ayat (4)

PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

Kategori Sub-Layanan

AS.26-01 LA.26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP)	AS.26-02 LA.26-02 Permohonan Pembetulan (Pasal 16 UU KUP)	AS.26-03 LA.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP)	AS.26-04 LA.26-04 Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Skp yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP)
AS.26-05 LA.26-05 Permohonan Pembatalan Skp atau SKP PBB dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP)	AS.26-06 LA.26-06 Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan	AS.26-07 LA.26-07 Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP)	AS.26-08 LA.26-08 Permohonan Pembatalan STP PBB yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP)
AS.26-09 LA.26-09 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Skp yang Tidak Benar	AS.26-10 LA.26-10 Permohonan Pengurangan PBB (Pasal 19 UU PBB)	AS.26-11 LA.26-11 Permohonan Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB)	AS.26-13 LA.26-13 Permohonan Pencabutan Koreksi (Pasal 16 KUP)
AS.26-14 LA.26-14 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	AS.26-18 LA.26-18 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar	AS.26-19 LA.26-19 Permohonan Pencabutan Permohonan Pembatalan STP PBB yang Tidak Benar	AS.26-20 LA.26-20 Permohonan Pencabutan Permohonan Pembatalan Skp atau SKP PBB dari Hasil Pemeriksaan
AS.26-21 LA.26-21 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan PBB	AS.26-22 LA.26-22 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Denda Administrasi PBB		

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.

1 500 200

www.pajak.go.id

Langkah 9: Klik Simpan

18

You are currently impersonating user: - ! NAMA00 000

Versi: 1.1.2-build-1935 id-ID 00 Login terakhir:

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Bantuan Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan *

DA32256264

Nomor Surat Kuasa

Cari

AS.25 Layanan Terkait Penagihan Aktif

AS.26 Keberatan dan Non Keberatan

AS.27 Prosedur Kesepakatan Bersama (MAP)

AS.28 Kesepakatan Harga Transfer

AS.29 Surat Wajib Pajak

AS.30 Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terkait Investasi yang disampaikan melalui OSS

AS.31 Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan

AS.32 Penundaan Pembebanan Kerugian atas Pengalihan atau Penarikan Harta yang Mendapatkan Penggantian Asuransi untuk Dibukukan sebagai Beban Masa Kemudian

AS.33 Pengesahan

AS.34 SKB PPN atas Impor/Penyerahan BKP Tertentu atau Pemanfaatan/Penyerahan JKP Tertentu

PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

AS.26-01

LA.26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP)

Simpan

AS.26-05

LA.26-05 Permohonan Pembatalan Skp atau SKP PBB dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP)

AS.26-06

LA.26-06 Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan

AS.26-07

LA.26-07 Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP)

AS.26-08

LA.26-08 Permohonan Pembatalan STP PBB yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP)

AS.26-09

LA.26-09 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Skp yang Tidak Benar

AS.26-10

LA.26-10 Permohonan Pengurangan PBB (Pasal 19 UU PBB)

AS.26-11

LA.26-11 Permohonan Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB)

AS.26-12

LA.26-12 Permohonan Pembatalan STP PBB yang Tidak Benar

AS.26-13

LA.26-13 Permohonan Pencabutan Koreksi (Pasal 16 KUP)

AS.26-14

LA.26-14 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

AS.26-15

LA.26-15 Permohonan Pembatalan STP PBB yang Tidak Benar

AS.26-16

LA.26-16 Permohonan Pembatalan STP PBB yang Tidak Benar

AS.26-17

LA.26-17 Permohonan Pembatalan STP PBB yang Tidak Benar

AS.26-18

LA.26-18 Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar

AS.26-19

LA.26-19 Permohonan Pencabutan Permohonan Pembatalan STP PBB yang Tidak Benar

AS.26-20

LA.26-20 Permohonan Pencabutan Permohonan Pembatalan Skp atau SKP PBB dari Hasil Pemeriksaan

Langkah 10: Klik Dokumen disisi bagian kiri dan klik Unggah

19

You are currently impersonating user: - ! NAMA000000

djp Versi: 1.1.2-build-1935 id-ID 00 Login terakhir:

Portal Saya • e-Faktur • eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses •

P0000180341

Dokumen Kasus

Cari Unggah

🔄 📄 📁 📌 🗑️

Nama Asli ↑↓	Tanggal Dokumen ↑↓	Aktif ↑↓	Terlihat di eFiling ↑↓	Kata Kunci ↑↓	Keterangan ↑↓	Hapus
Tidak ada data yang ditemukan.						

0 of 0 << < > >> 10 ▾

Kemampuan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gattot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.

Kring Pajak 1 500 200 Situs Pajak www.pajak.go.id

Dokumen:

- Dokumen Produk Hukum yang diajukan Keberatan

Langkah 11: Isi Form Unggah Dokumen

20

You are currently impersonating user - I NAMA00 000

Portal Saja

Detail

P00001

Detail Kasus

Informasi U

Alur Kasus

Komponen

Komentar

Dokumen

Detail Dokumen

Tindakan *

Add New Document **Pilih Tindakan dengan pilih "Add New Document"**

Nama Jenis Dokumen *

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar **Pilih Nama Jenis Dokumen**

Nomor Dokumen

00001/206/23/213/24 **Isi nomor dokumen dengan nomor objek yang diajukan keberatan**

Tanggal Dokumen *

29-11-2024 **Pilih tanggal dokumen dengan tanggal objek yang diajukan keberatan**

28-01-2025

Tenda Terima Dokumen *

Dokumen Wajib Pajak

NIK/NPWP

Paspor

Perihal Dokumen *

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pengirim Dokumen *

KPP Pratama **Isi Pengirim Dokumen dengan isi "KPP Pratama"**

Keaslian Dokumen *

Original

Deskripsi Dokumen

Penerima

Catatan & Komentar

Tag Dokumen

Klasifikasi *

Biasa

Bahasa *

Indonesia

Dokumen Fisik

Jenis Pajak

Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak

Bulan Pajak

Masa Pajak

Mengarsipkan *

Pilih file Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.pdf **Upload dokumen dengan cara klik "Pilih File"**

Maksimal ukuran berkas diupload 512 MB

Klik "Simpan"

Simpan Tutup

Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gajah Mada, No. 40-42, Jakarta 12190

Telp: (+62) 21 - 525 0200

1 500 200

Situs Pajak

www.pajak.go.id

Langkah 12: Klik Alur Kasus

21

You are currently impersonating user: - ! NAMA00

i000

 djp

Versi: 1.1.2-build-1936 id-ID

Login terakhir:



Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

P0000

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Informasi Umum

Kasus

Nomor

Tipe

Nama Wajib Pajak Pusat

NPWP Wajib Pajak Pusat

Alasan

Prioritas

Status

Portal Status

Kasus Sebelumnya

Tanggal Mulai

Tanggal Akhir

Tanggal Tindakan Berikutnya

Penyelesaian yang diharapkan

Jenis Komunikasi

Keterangan

Kantor Wilayah

Kantor Pelayanan Pajak

Hasil Kasus

Ditutup

Nomor Protokol

Tanggal Protokol

P0000181285

AS.26-01 Objection Request (Portal)

Permohonan Wajib Pajak

Tinggi

Diproses

Diproses

02 Februari 2025

2025/02/04 12:40:17.657000000

KasusCreated for Administrative Service Request Form AS.26-01

Tindakan Terakhir:

Kantor Wilayah DJP

Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tindakan Kasus

Membatalkan Kasus

Tarik Kasus

 djp

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0208

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.

1 500 200 www.pajak.go.id

22

Sengketa

Tambah Data

Sengketa (Pis Koreksi) T1	Jumlah menurut Wajib Pajak T1	Alasan keberatan T1

Tidak ada data yang ditemukan.

0 of 0 << < > >>

5

Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak*

0

LAMPIRAN

Tambah Data

Jenis Dokumen T1	Jumlah Lampiran T1

Tidak ada data yang ditemukan.

0 of 0 << < > >>

5

Jumlah Lampiran

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung*

Please select
Kirim ke email anda

Simpan

Atur Ulang

Validasi

Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini Mengisi Form Keberatan

Lanjut

Cek Kasus

Copyright © 2023 Direktorat Jenderal Pajak

Pajak
1 500 000

Grafik Pajak
www.pajak.go.id

Langkah 14: Isi Alasan Keberatan

23

You are currently impersonating user: - I NAMA000000

Alamat Wakil/Kuasa* Jakarta

Nomor Telepon Wajib Pajak/Wakil/Kuasa 081211111111111

Rincian Keberatan

Kedua Kahir (Force Majeure)* Tidak

Jenis Objek Transaksi*

Nomor Revisi

Tanggal Transaksi

Jenis Pajak

Periode/Tahun

Jumlah

Nilai Mata Uang

Jumlah yang Dibayar

Sisa Nilai Pajak

Nomor Revisi

Tanggal Revisi

Sengketa

Tambah Data

Objection Request Taxpayer Input Form

Sengketa (Pos Koreksi)* Peredaran Usaha

Jumlah Menurut Wajib Pajak* 1.000.000

Alasan Keberatan* Peredaran usaha sudah sesuai

Simpan Atur Ulang

Peredaran Usaha 1.000.000 Peredaran usaha sudah sesuai

1 of 1 < 1 > 5

Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak* 1.000.000

LAMPIRAN

Tambah Data

24

www.pajak.go.id

Langkah 16: Form Keberatan Sudah Diisi

25

You are currently impersonating user - | NAMA: 300

Portal Sapa • e-Faktur • e-Bupat • Surat Pemberitahuan (SPT) • Barisan • Pengawasan • Buku Bazar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akun •

PO000181931 Perutean Kasus

Detail Kasus
Informasi Umum
Alur Kasus
Komponen yang Diambilkan
Komentar
Dokumen

Objection Request Taxpayer Input Form

Seluruh Pengisian

Seluruh Komunikasi: Daring (Porto Wajib Pajak)
Jenis Layanan: LA-26 Keberatan dan Non Keberatan
Jenis Sub Layanan: LA-26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP)
Tanggal Terima: 04-02-2025
Nomor Surat Keberatan: PO000181931/2/2025
Tanggal Pemohonan: 04-02-2025

Profil Wajib Pajak

NPWP Wajib Pajak
Nama Wajib Pajak
NPWP Waki/Kusa
Nama Waki/Kusa
Alamat Wajib Pajak

Nama KPP
Alamat Kantor Pelayanan Pajak

Jabatan Waki/Kusa*: Direktur
Alamat Waki/Kusa*: Jakarta

Nomor Telepon Wajib Pajak/Waki/Kusa: 08112222222

Rincian Keberatan

Kesediaan Katar (Force Majure): Tidak
Jenis Objek Keberatan*: Surat Ketetapan Pajak Nihil
Transaksi*: Surat Ketetapan Pajak
Nomor Referensi: 0000
Tanggal Transaksi: 31-12-2024
Jenis Pajak: PPh Pasal 25/29 Badan (Tahunan)
Periode/Tahun Pajak: 0
Nilai Mata Uang: 0
Jumlah yang Ditunda: 0
Sta Nilai yang Tidak Menjadi Sengketa: 0
Nomor Referensi Asli: 0000
Tanggal Referensi Asli: 31-12-2024

Sengketa

Tambah Data

Sengketa (Pis Koneksi) T1	Jumlah menurut Wajib Pajak T1	Alasan keberatan T1
Pencapaian Usaha	10.000.000	Sudah sesuai

Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak: 1.000.000

LAMPIRAN

Tambah Data

Jenis Dokumen T1	Jumlah Lampiran T1
Surat Keberatan	1

Jumlah Lampiran: 1

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung: Surat Keberatan Wajib Pajak_CK20251715863046001191.pdf

Simpan Atur Ulang Validasi

Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini Mengisi Form Keberatan

Selesai Tindak Kasus

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak. 1 800 200

Langkah 17: Upload Lampiran Keberatan

26

You are currently impersonating user: - I NAMA X (000)

Tanggal Permohonan: 04-02-2025

Alur Kasus

- Komponen yang Dinekatkan
- Komentar
- Dokumen

Dokumen Pendukung

Detail Dokumen

Tindakan +

Nama Jenis Dokumen *

Nomor Dokumen

Tanggal Dokumen *

Tanda Terima Dokumen *

Dokumen Wajib Pajak

NIK/NPWP

Respon

Perihal Dokumen *

Pengirim Dokumen *

Klasifikasi Dokumen *

Deskripsi Dokumen

Penerima

Catatan & Komentar

Tag Dokumen

Klasifikasi *

Bahasa *

Dokumen Fisik

Jenis Pajak

Tahun Pajak

Bulan Pajak

Mengisi * *

Add New Document

Lampiran Surat Keberatan

S-012/KEB/2025

01-02-2025

04-02-2025

01

Nama: NAMA

Lampiran Surat Keberatan

Wajib Pajak

Original

Basis

Indonesia

Jenis Pajak

Masa Pajak

Pilih file: Surat Keberatan Wajib Pajak.pdf

Maksimal ukuran berkas unggah: 512 MB

Simpan

Tutup

Langkah 18: Klik Create PDF

27

You are currently impersonating user - 1 NAME - .000

Portal Sapa - e-Sakti - eTaget - Surat Pemberitahuan (SPT) - Revisi - Penyetoran - Bukti Revisi - Laporan Wajib Pajak - Manajemen Akun -

P0000181931

Detail Kasus

- Informasi Umum
- Aktif Kasus
- Komponen yang Disematkan
- Komentar
- Dokumen

Perutean Kasus

DOCUMENT_OUTBOUND

Dokumen Keluar - CTAS

[[D.01_D.01.1_DOC001]] Surat Keberatan

Create PDF

Sign

Number of Signatures: 1

Notarize: 0

Bukti Penerimaan Surat Elektronik

PC D.01_1_FORM006

Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

Wakil/Kuasa

Jenis Layanan

Jenis Sub Layanan

Unit Pemroses

Jenis Keberatan

* skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan (Jabel)

Nomor skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

Tanggal skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

Kantor Daerah

1 A-26 Keberatan dan Non Keberatan

LA26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surat Kelengkapan Pajak Nihil

12edb592-ed37-40b8-8e4c-60e995010b7d

Surat Kelengkapan Pajak (Nihil) Pasal 25/29 Badan (Jahumant)

0000

34

31-12-2024

DON Shual 24/25 Hartono (Bakumant)

PLAS_UPDATE

Create Processing Request OK

Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini: Mencetak Surat Keberatan dan Mengisi Form Bukti Penerimaan Elektronik

Lanjut

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gajah Mada No. 48-52, Jakarta 12190
Telp: (021) 21 - 525 0000

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak.

1 500 200

www.pajak.go.id

Langkah 19: Pilih Klasifikasi (scroll ke atas)

28

You are currently impersonating user: I NAMA... 1000

Verst: 1.1.2-build-1936 | ID-ID | Login terakhir

Portofolio - e-Faktur - e-Rupiah - Surat Pemberitahuan (SPT) - Baris - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Alas -

P0000181931

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Perutean Kasus

Buat Formulir Dokumen

Nama Jenis Dokumen *

Document Date dd-mm-yyyy

Surat Keberatan

Perihal Dokumen *

Keaslian Dokumen *

Klasifikasi *

Deskripsi Dokumen

Catatan dan Komentar

Tag Dokumen

Surat Keberatan

Original

Please Select

Bukti Penerimaan Surat Elektronik

Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

Wakil/Kuasa

Jenis Layanan

Jenis Sub Layanan

Unit Pemroses

Jenis Keberatan

* skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan (Label)

Nomor skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

Tanggal skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

Surat Keberatan dan Non Keberatan

LA.26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Surat Ketetapan Pajak Nihil

Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan (Tahunan)

0000

24

31-12-2024

DBH Daxial 24/120 Rutan (Tahunan)

Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini: Mencetak Surat Keberatan dan Mengisi Form Bukti Penerimaan Elektronik

Lanjut

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak

1 500 200

Langkah 20: Klik Simpan

29

You are currently impersonating user - I NAMA0 000

Portal Saja - e-Faktur - e-Report - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bea Cukai - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses

P0000161931

Detail Kasus

- Informasi Umum
- Alur Kasus
- Komponen yang Disematkan
- Komentar
- Dokumen

Perutean Kasus

[[D.01]

Deskriptor Dokumen

Catatan dan Komentar

Log Dokumen

Bahasa *

Jenis Pajak

Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak

Bulan Pajak

Header Dokumen

Simpan

Bukti Penerimaan Surat Elektronik

Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

Wakil/Kusaka

Jenis Layanan

Jenis Sub Layanan

Unit Pemroses

Jenis Keberatan

* skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan (Label)

Nomor skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

Tanggal skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

Tempat Pengisian

LAJ26 Keberatan dan Non Keberatan

1.1.1.1.1 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Surat Ketetapan Pajak Nihil

Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan (Tahunan)

00001 24

31-12-2024

PPh Pasal 25/29 Badan (Tahunan)

Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini: Mencetak Surat Keberatan dan Mengisi Form Bukti Penerimaan Elektronik

Lanjut

PLAQ_UPDATE
Create Processing Request DA

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Sudirman No. 40-42, Jakarta 12190
Telp (021) 21 - 123 0300

Copyright © 2023 Direktorat Jenderal Pajak.
1 500 200

Langkah 21: Klik Sign

30

You are currently impersonating user: -1 NAMA[REDACTED] 000

Portal Sisa • e-Faktur • e-Bupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses

P0000181931

Detail Kasus

- Informasi Umum
- Alur Kasus
- Komponen yang Disematkan
- Komentar
- Dokumen

Perutean Kasus

Dokumen Keluar - CTAS

[[D.01_D.01.1_DOC001]] Surat Keberatan

Download Preview File [[D.01_D.01.1_DOC001]] Surat Keberatan

Sign Number of Signatures 1 Tertanda 0

Buat Ulang Dokumen

Setelah data diubah, silakan tekan Regenerate Document dan buat file lagi

Bukti Penerimaan Surat Elektronik

Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

Wakil/Kuasa

Jenis Layanan LA.26 Keberatan dan Non Keberatan

Jenis Sub Layanan LA.26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP)

Unit Pemroses Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jenis Keberatan Surat Ketetapan Pajak Nihil

* skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan (Label)

Nomor skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

Tanggal skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

Penyerah

DDH Pasal 24/25 Badan (Tahunan)

Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini: Mencetak Surat Keberatan dan Mengisi Form Bukti Penerimaan Elektronik

Lanjut

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.

1 900 200

www.pajak.go.id

Langkah 22: Masukkan *Passphrase* Klik Simpan

31

You are currently impersonating user: - I NAMA - 300

Portal Saja • e-Faktur • e-Bupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses

P0000181931

Detail Kasus

- Informasi Umum
- Alur Kasus
- Komponen yang Disematkan
- Komentar
- Dokumen

Perutean Kasus

DOCUMENT_OUTBOUND

Delapan Kasus - CTAS

Panel Terakhir

Jenis Penandatanganan* Tax Payer Signature

Penyedia Penandatanganan* Kode Otorisasi DJP

NPWP

Signer Password * *****

Simpan Atur Ulang

Bukti Penerimaan Surat Elektronik

FC 0.01.L.FORM005

Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

Wakil/Kuasa

Jenis Layanan LA26 Keberatan dan Non Keberatan

Jenis Sub Layanan LA26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP)

Unit Pemroses Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jenis Keberatan Surat Ketetapan Pajak Nihil

* skip/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan

skip/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan (Label)

Nomor skip/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan 0000 /24

Tanggal skip/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan 31-12-2024

Isi Surat

BDH: Baccal 34/29 Baccan (Tahunan)

Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini: Mencetak Surat Keberatan dan Mengisi Form Bukti Penerimaan Elektronik

Lanjut

FLAG_UPDATE
Create Processing Request OK

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gajah Suci, Km. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525 0308

Copyright © 2023 Direktorat Jenderal Pajak.

1 500 200

www.pajak.go.id

Langkah 23: *Review* BPE dan Klik Simpan

32

You are currently impersonating user - I NAMA 000

Portal Saya - e-Faktur - e-Bupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses

P0000181931

Detail Kasus

- Informasi Umum
- Alur Kasus
- Komponen yang Disematkan
- Komentar
- Dokumen

Perutean Kasus

Dokumen Keluar - CTAS

[[D.01_D.01.1_DOC001] Surat Keberatan]

Download Preview File [D.01_D.01.1_DOC001] Surat Keberatan

Sign Number of Signatures 1 Tertanda 1

Buat Ulang Dokumen

Setelah data diubah, silakan tekan Regenerate Document dan buat file lagi!

FC D.01.1_FORM005

Wakil/Kuasa	
Jenis Layanan	LA.26 Keberatan dan Non Keberatan
Jenis Sub Layanan	LA.26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP)
Unit Pemroses	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang
Jenis Keberatan	Surat Ketetapan Pajak Nihil
* skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan	
skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan (Label)	Surat Ketetapan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan (Tahunan)
Nomor skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan	0000 /24
Tanggal skp/ SPPT PBB/ Bukti Pemungutan/Pemotongan	31-12-2024
Jenis Pajak	PPh Pasal 25/29 Badan (Tahunan)
Masa Pajak/Tahun Pajak	

Simpan **Buat Ulang**

Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini: **Mencetak Surat Keberatan dan Mengisi Form Bukti Penerimaan Elektronik**

Lanjut

FLAG_UPDATE
Create Processing Request OK

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gajah Mada No. 43-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 575 0308

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.

1 500 200

www.pajak.go.id

Langkah 24: Cetak BPE dan Klik Lanjut

33

You are currently impersonating user: - I NAMA -000

Verst: 1.1.2-build-1936 id-ID Login terakhir:

Portal Saya • e-Faktur • eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses

P0000181931

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Perutean Kasus

DOCUMENT_OUTBOUND

Success
Document created successfully!

[[D.01_D.01.1_DOC005] Bukti Penerimaan Elektronik Permohonan Keberatan]

[Download](#) [Preview](#) File [D.01_D.01.1_DOC005] Bukti Penerimaan Elektronik Permohonan Keberatan

Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini: **Menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik**

[Lanjut](#)

34

www.pajak.go.id



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200